

The Effect Of Regional Financial Management Information System And Regional Financial Accounting System On Local Government Performance: Application Of Performance-Based Budgeting As A Moderation Variable (Empirical Study On Central Maluku Regency Government)

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah)

Wilisen Josafat Alexsander Titaley^{1*}, Paul Usmany², Dwi Hariyanti³

Pascasarjana Universitas Pattimura, Indonesia

titaleywilisen@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of regional financial management information systems and regional financial accounting systems on local government performance moderated by the implementation of performance-based budgeting. The sample used in this study was 47 respondents. The data analysis used in this study was Partial Least Square (PLS). The results showed that the influence of the regional financial management information system had a positive and significant influence on the performance of local governments. The results also show that the regional financial accounting system has a positive and significant influence on the performance of local governments. Furthermore, the influence of the regional financial management information system on local government performance will be weak if moderated by the implementation of performance-based budgeting. And the influence of the regional financial accounting system on the performance of local governments will be stronger if moderated by the implementation of performance-based budgeting.

Keywords : *regional financial management information system, regional financial accounting system, implementation of performance-based budgeting, local government performance*

1. Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan daerah melakukan tugas pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas urusan pemerintah seperti politik internasional, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional (Fauzi, 2019).

Dalam proses desentralisasi fiskal, penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) disertai dengan penyerahan dan pengalihan wewenang. Ada dua cara untuk memanfaatkan kewenangan pendanaan yang diberikan: memanfaatkan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan antara daerah dan pusat (Putri & Pinang, n.d.). Wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerah sendiri, dan Dana Perimbangan, yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

Anggaran daerah, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan instrumen kebijakan utama yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Anggaran daerah berfungsi sebagai alat untuk menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, memberikan wewenang untuk pengeluaran di masa depan, dan membantu mengembangkan standar untuk evaluasi kinerja. Selain itu, anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur semua operasi di berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2021).

Capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal adalah dasar penyusunan APBD berbasis kinerja. Dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan faktor eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah harus bertindak lebih responsif, terbuka, dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat saat menjalankan operasinya (Khusaini et al., 2021).

Kinerja didefinisikan sebagai hasil atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dalam kuantitas dan kualitas yang diukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1). Ukuran kinerja anggaran mendorong pelaksana anggaran untuk mencapai hasil terbaik sesuai dengan ukuran tersebut (Krisniawati, 2021). Kegagalan adalah ukuran untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Meskipun kinerja memerlukan penghargaan untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan dukungan publik atau masyarakat untuk pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, prestasi kerja harus diperiksa dengan menggunakan tolok ukur, indikator, dan target kinerja. Hasil akhir dari penilaian kinerja adalah pencapaian yang digambarkan sebagai ekonomis, efisien, dan efektif. Efektivitas adalah pelaksanaan program, sedangkan ekonomis dan efisiensi adalah pelaksanaan kegiatan. Laporan tentang pelaksanaan kegiatan diberikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah daerah belum menggunakan indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sepenuhnya saat melakukan evaluasi kinerja. Akibatnya, pengukuran kinerja mereka belum lengkap.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada pembagian tanggung jawab manajer pada tingkatan organisasi yang berbeda, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas pada tingkatan tersebut. Menurut , akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah tindakan birokrasi publik atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat, dan apakah pelayanan publik tersebut mampu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat (Syamjaya & Saputra, 2021). Pada dasarnya, akuntabilitas berarti memberikan informasi dan pengungkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang aktivitas dan kinerja finansial. Untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi.

Kabupaten Maluku Tengah mendapat predikat serta penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun 2016 atas laporan keuangan daerah tahun 2015. Berdasarkan capaian kinerja WTP yang dicapai, menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Melalui predikat ini maka Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat mempertahankan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan dan penataan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Kabupaten Maluku Tengah selama 7 tahun terakhir sampai dengan tahun 2022 secara berturut-turut memperoleh hasil opini BPK WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperoleh nilai 61,71 atau predikat "B". Di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2021 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memperoleh nilai 62,11 atau predikat "B". Sedangkan di tahun 2022 belum ada hasil yang disampaikan oleh MENPAN-RB, sehingga masih menggunakan nilai tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah akan terus melakukan perbaikan nilai SAKIP hingga dapat mencapai target "A" pada tahun-tahun berikutnya. Adapun beberapa langkah perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah antara lain adalah : memperkuat komitmen pimpinan, penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP, pendampingan dari Tim KemenPAN-RB, penguatan kapasitas dan kesungguhan OPD, dan menerapkan SAKIP secara elektronik dan terintegrasi.

2. Tinjauan Pustaka

Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik mencakup hukum dan kejujuran, manajemen, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Novatiani et al., 2019). Bagian terpenting dari menentukan kredibilitas manajemen pemerintah daerah adalah akuntabilitas manajemen. Prinsip pertanggungjawaban dapat memiliki konsekuensi yang luas. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah tidak bertanggung jawab, mereka dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan hal-hal lainnya. Jika tidak ada akuntabilitas, risiko investasi meningkat, dan efisiensi dan persaingan berkurang.

Karena dana yang digunakan untuk menyediakan layanan berasal dari masyarakat, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini terjadi karena dana berasal dari masyarakat baik secara langsung (melalui pemanfaatan kekuatan keuangan daerah) maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Saat ini, pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih horisontal, dengan pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD dan masyarakat secara keseluruhan (Sunarso & SH, 2023). Namun, pada kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah lebih menekankan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat umum.

Kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dalam kuantitas dan kualitas yang diukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1) (Krisniawati, 2021). Oleh karena itu, ukuran kinerja anggaran mendorong pelaksana anggaran untuk mencapai hasil terbaik sesuai dengan ukuran tersebut. Sementara pencapaian kinerja membutuhkan penghargaan untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan dukungan publik, kegagalan adalah satu cara untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem dapat digambarkan sebagai kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Prabowo, 2020). Namun, menurut (Kustina et al., 2022) sistem adalah kumpulan komponen yang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input dan menghasilkan output melalui proses transformasi yang teratur.

Informasi, menurut (Kustina et al., 2022), adalah data yang telah diubah menjadi bentuk yang penting bagi orang yang menerimanya dan memiliki nilai yang dapat dilihat dan digunakan untuk membuat keputusan saat ini dan di masa depan. Informasi adalah data penting yang memberikan pengetahuan dan bermanfaat, menurut (Prehanto et al., 2020). Selain itu, dijelaskan tentang faktor-faktor berikut yang menentukan relevansi informasi: tujuan penerima; kecepatan penyampaian dan pengolahan data; waktu; lokasi atau ruang; bentuk; dan semanti.

Sistem di dalam suatu organisasi disebut sistem informasi. Sistem ini menggabungkan kebutuhan untuk pengolahan transaksi harian, membantu operasi, bertanggung jawab atas manajemen, dan kegiatan strategis organisasi, dan menyediakan berbagai laporan kepada pihak luar. Sistem informasi terdiri dari kumpulan perangkat lunak dan hardware komputer, prosedur,

instruksi, formulir, dan individu yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data. Sistem informasi membantu proses pengambilan keputusan dan pengawasan organisasi, baik secara manual maupun digital. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Anggaran Berbasis Kinerja

Sangat terkait dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis perusahaan, anggaran berbasis kinerja berfokus pada output. Anggaran Berbasis Kinerja mengukur kinerja organisasi dengan mengalokasikan sumber daya pada program daripada unit organisasi (Ginanjari et al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, APBD dibuat dengan menggabungkan program dan kegiatan dari semua satuan kerja pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi. Ini dilakukan untuk menghindari duplikat rencana kerja dan juga untuk mengurangi jarak antara target dan hasil yang dicapai sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Penganggaran berbasis kinerja ini berkonsentrasi pada seberapa efisien suatu aktivitas atau kegiatan dijalankan (Ritonga & Nurlaila, 2023). Perbandingan antara input dan output dikenal sebagai efisiensi. Suatu aktivitas dikatakan efisien jika outputnya lebih besar atau sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya mengacu pada apa yang dibelanjakan, seperti yang dilakukan oleh sistem anggaran konvensional; itu juga mengacu pada tujuan atau rencana tertentu yang memerlukan anggaran biaya yang cukup dan terukur untuk mendukung pelaksanaannya.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(Mulyadita, 2021) menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi aset. Disempurnakan oleh Permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

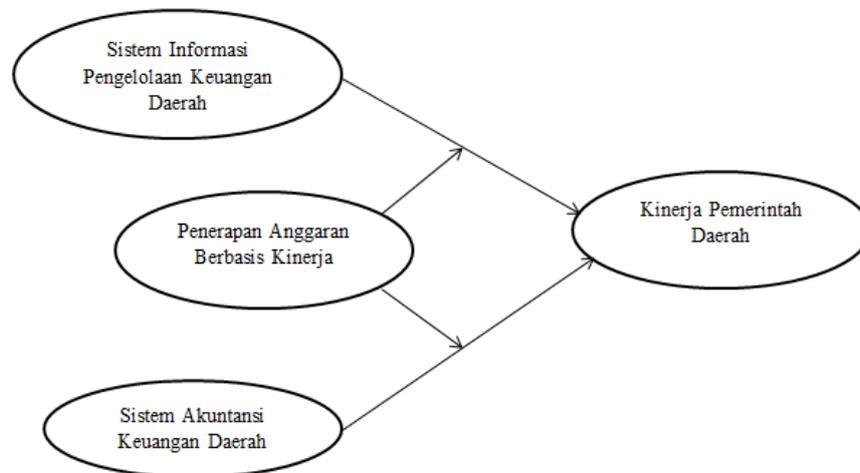
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi

atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5. Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pada sebuah objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Objek alamiah merupakan objek yang apa adanya atau sesuai dengan kenyataan dilapangan, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti berada di objek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan teknik jenuh atau sensus yang dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel yang berjumlah 47 OPD. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relative kecil, sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Anggraini & Hidayat, 2021).

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Square* (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Herman O. A. Wold dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an dalam (Martadisastra, 2017). PLS merupakan model analisis yang *powerful* karena dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval dan rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS dapat juga dikatakan sebagai metode pendekatan PLS untuk pemodelan persamaan struktural. Dalam komunitas PLS, istilah "*Path Modeling*" lebih disukai dari pada *Structural Equation Modeling*. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam literatur PLS.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas konvergen digunakan guna menguji validitas dengan mengevaluasi model pengukuran. Efektivitas konvergensi model pengukuran dengan indikator reflektif dapat diamati dari korelasi antara masing-masing skor indikator dengan skor strukturnya (Ghozali, 2006).

Ukuran refleksif individu dikatakan tinggi jika korelasinya dengan konstruk yang akan diukur melebihi 0,70.

Tabel 1. Hasil *Convergent Validity*

	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah
SIPKD1	0,744	0,639	0,736	0,648
SIPKD2	0,662	0,468	0,433	0,541
SIPKD3	0,835	0,748	0,680	0,727
SIPKD4	0,809	0,630	0,587	0,700
SIPKD5	0,700	0,462	0,516	0,565
SIPKD6	0,851	0,632	0,676	0,748
SIPKD7	0,665	0,526	0,572	0,568
SIPKD8	0,705	0,606	0,534	0,590
SIPKD9	0,581	0,508	0,473	0,518
SIPKD10	0,680	0,525	0,488	0,574
SIPKD11	0,778	0,610	0,577	0,621
SIPKD12	0,738	0,640	0,669	0,657
SIPKD13	0,734	0,664	0,627	0,626
SIPKD14	0,771	0,769	0,644	0,679
PABK1	0,388	0,522	0,445	0,455
PABK2	0,704	0,729	0,638	0,731
PABK3	0,567	0,783	0,682	0,669
PABK4	0,602	0,770	0,600	0,637
PABK5	0,678	0,739	0,675	0,664
PABK6	0,679	0,815	0,699	0,724
PABK7	0,627	0,640	0,580	0,610
PABK8	0,543	0,760	0,482	0,614
PABK9	0,662	0,853	0,631	0,665
PABK10	0,597	0,751	0,565	0,630
SAKD1	0,611	0,666	0,772	0,537
SAKD2	0,726	0,619	0,844	0,756
SAKD3	0,673	0,666	0,866	0,735
SAKD4	0,636	0,776	0,806	0,713
SAKD5	0,739	0,713	0,868	0,795
SAKD6	0,636	0,669	0,857	0,759
KPD1	0,566	0,631	0,505	0,681
KPD2	0,682	0,719	0,649	0,818
KPD3	0,718	0,652	0,628	0,819
KPD4	0,686	0,800	0,624	0,689
KPD5	0,666	0,650	0,806	0,830
KPD6	0,699	0,665	0,758	0,763
KPD7	0,645	0,730	0,624	0,829
KPD8	0,712	0,631	0,810	0,853

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Rentang korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah antara 0,662 dan 0,851, lebih besar dari yang direkomendasikan 0,500, yang menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan valid.

Rentang korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan anggaran berbasis kinerja adalah antara 0,522 dan 0,853, lebih besar dari yang direkomendasikan 0,500, yang

menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dikatakan valid. Rentang korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur sistem akuntansi keuangan daerah adalah antara 0,772 dan 0,868, lebih besar dari yang direkomendasikan 0,500, yang menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang konstruk sistem akuntansi keuangan daerah dapat dikatakan valid. Kemudian, rentang korelasi indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk kinerja pemerintah daerah adalah antara 0,681 dan 0,853, lebih besar dari yang direkomendasikan 0,500, yang menunjukkan bahwa pertanyaan tentang konstruk kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan valid.

Pemeriksaan selanjutnya dalam penilaian validitas diskriminan adalah membandingkan nilai AVE untuk setiap konstruk dengan kuadrat korelasi antar konstruk.

Tabel 2. Hasil *Discriminant Validity*

	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Mean Communalities (AVE)
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	0,480	0,445	0,433	0,541
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,480	1	0,666	0,458	0,550
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,445	0,466	1	0,448	0,699
Kinerja Pemerintah Daerah	0,433	0,458	0,448	1	0,621
Mean Communalities (AVE)	0,541	0,550	0,699	0,621	0

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan hasil tabel, nilai AVE struktur sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah 0,541, dan kuadrat korelasi konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan konstruk lain (baris pertama pada tabel) lebih kecil dari AVE sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Nilai AVE struktur penerapan anggaran berbasis kinerja adalah 0,550, kuadrat korelasi konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja dengan konstruk lain (baris kedua pada tabel) lebih kecil dibandingkan AVE penerapan anggaran berbasis kinerja. Nilai AVE struktur sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,699, kuadrat korelasi konstruk sistem akuntansi keuangan daerah dengan konstruk lain (baris ketiga pada tabel) lebih kecil dari AVE sistem akuntansi keuangan daerah. Serta nilai AVE struktur kinerja pemerintah daerah adalah 0,621, kuadrat korelasi konstruk kinerja pemerintah daerah dengan konstruk lain (baris ketiga pada tabel) lebih kecil dari AVE kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah memiliki nilai validitas diskriminan yang baik.

Melihat perhitungan PLS untuk setiap konstruk yang menghasilkan nilai keandalan komposit adalah cara untuk melakukan pengujian reliabilitas. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai keandalan komposit > 0.70 (Ghozali, 2006) dalam (Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Latent variable	Dimensions	Cronbach's alpha	D.G. rho (PCA)
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	14	0,934	0,942
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	10	0,906	0,923
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	6	0,914	0,933
Kinerja Pemerintah Daerah	8	0,911	0,929

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Nilai keandalan komposit konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah 0,942. Nilai ini di atas 0,70 sebagai nilai kritis, maka semua pertanyaan tentang sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat diandalkan/reliabel. Nilai keandalan komposit dari konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja adalah 0,923 (di atas nilai kritis), semua pertanyaan tentang penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diandalkan/reliabel. Selanjutnya, nilai keandalan komposit dari konstruk sistem akuntansi keuangan daerah adalah 0,933 (di atas nilai kritis), sehingga semua pertanyaan tentang sistem akuntansi keuangan daerah dapat diandalkan/reliabel. Serta, nilai keandalan komposit dari konstruk kinerja pemerintah daerah adalah 0,929 (di atas nilai kritis), sehingga semua pertanyaan tentang kinerja pemerintah daerah dapat diandalkan/reliabel.

Pengujian Inner Model atau Model Struktural

Evaluasi suatu model menggunakan PLS dimulai dengan melihat *R-squared* untuk setiap konstruk potensial yang relevan. Perubahan nilai *R-squared* dapat digunakan untuk menilai apakah beberapa konstruksi laten independen memiliki efek substansial pada efek konstruksi laten dependen. Berikut adalah hasil estimasi *R-square* menggunakan *XLSTAT PLS PM 2014*.

Tabel 4. Nilai *R Square* (R^2)
(Moderasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

R^2	F	Pr > F	Critical ratio (CR)
0,868	94,539	0,000	0,868

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014*.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R^2 konstruk kinerja pemerintah daerah adalah 0,868. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar kekuatan penjelas dari konstruk independen atas konstruk dependen, dan dengan demikian semakin baik persamaan struktural. Artinya bahwa konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki kekuatan pengaruh sebesar 86,8% terhadap konstruk kinerja pemerintah daerah.

Tabel 5. Nilai *R Square* (R^2)
(Moderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

R^2	F	Pr > F	Critical ratio (CR)
0,796	55,942	0,000	0,796

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014*.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R^2 konstruk kinerja pemerintah daerah adalah 0,796. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar kekuatan penjelas dari konstruk independen atas konstruk dependen, dan dengan demikian semakin baik persamaan struktural. Artinya bahwa konstruk sistem akuntansi keuangan daerah memiliki kekuatan pengaruh sebesar 79,6% terhadap konstruk kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis 1

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Pengaruh konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah adalah positif (0,447) dan signifikan pada 0,000 ($4,200 > 1,658$).

Tabel 6. Hasil *Inner Weights* (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Latent variable	Value	Standard error	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,055	0,000	1,000	
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,447	0,106	4,200	0,000	Diterima

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014*.

Hipotesis 2

Hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, sistem akuntansi keuangan daerah berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Pengaruh konstruk sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah adalah positif (0,509) dan signifikan pada 0,000 ($4,780 > 1,658$).

Tabel 7. Hasil *Inner Weights* (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Latent variable	Value	Standard error	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,068	0,000	1,000	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,509	0,106	4,780	0,000	Diterima

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014*.

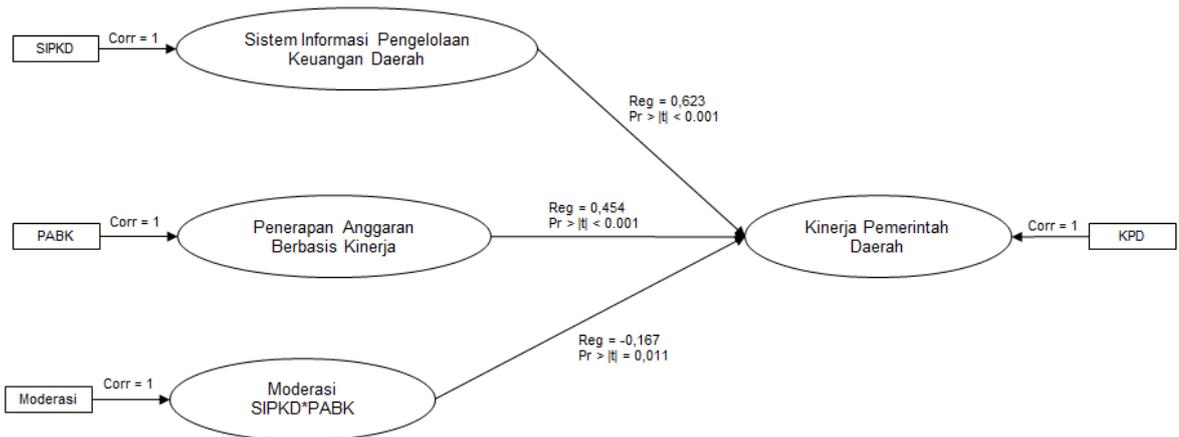
Hipotesis 3

Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa pengaruh dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, pengaruh dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah akan menjadi lemah jika dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Pengaruh konstruk moderasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah* penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah adalah negatif (-0,167) dan signifikan pada 0,011 ($-2,676 > 1,658$).

Tabel 8. Hasil *Inner Weights* (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Latent variable	Value	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,000	1,000	
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,623	7,851	0,000	
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,454	5,686	0,000	
Moderasi SIPKD*PABK	-0,167	-2,676	0,011	Diterima

Sumber: *Output XLSTAT PLS PM 2014*.



Gambar 2. Full Model Moderasi SIPKD*PABK

Dengan menggunakan pendekatan PLS, maka dapat dikelompokkan variabel moderator, yaitu (Sugiono, 2004):

- 1). Bila persamaan (2) β_2Z , β_2 signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X*Z$, β_3 tidak signifikan, maka variabel Z bukan variabel moderator, tapi ia merupakan suatu variabel independen, intervening, exogenous, antecedent, atau prediktor.
- 2). Bila persamaan (2) β_2Z , β_2 tidak signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X*Z$, β_3 signifikan, maka Z merupakan Pure Moderator (Z merupakan variabel moderator murni)
- 3). Bila persamaan (2) β_2Z , β_2 tidak signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X*Z$, β_3 tidak signifikan, maka variabel Z merupakan Homologizer Moderator.
- 4). Bila persamaan (2) β_2Z , β_2 signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X*Z$, β_3 signifikan, maka variabel Z merupakan suatu Quasi Moderator.

Berdasarkan hasil analisis data dengan merujuk pada pada ketentuan diatas menurut (Tambun, 2013), maka jenis moderasi untuk hipotesis 3 adalah Quasi Moderator. Artinya bahwa konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan konstruk yang memoderasi hubungan antara konstruk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan konstruk kinerja pemerintah daerah, sekaligus konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja juga menjadi konstruk eksogen/independen.

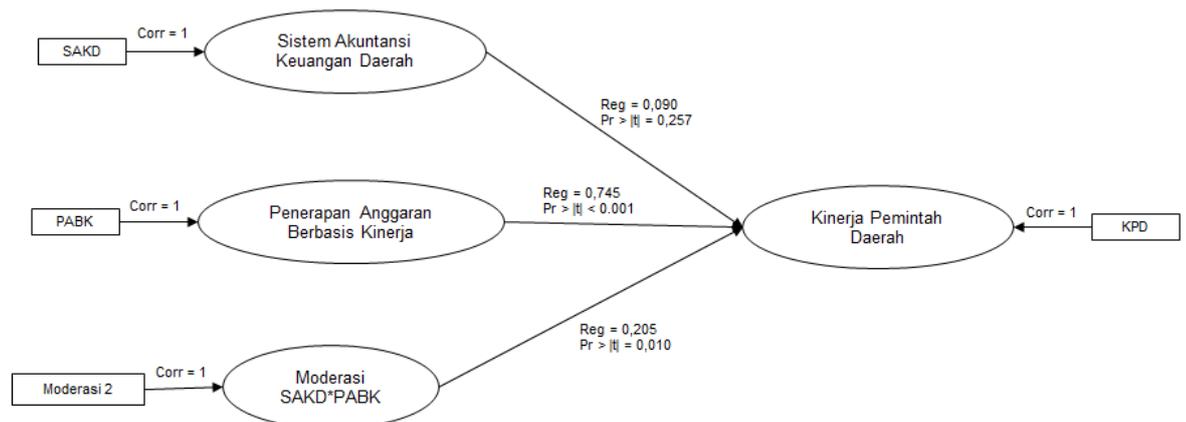
Hipotesis 4

Hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Pengaruh konstruk moderasi sistem akuntansi keuangan daerah*penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah adalah positif (0,205) dan signifikan pada 0,010 (2,690 > 1,658).

Tabel 9. Hasil Inner Weights (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Latent variable	Value	t	Pr > t	Hipotesis
Intercept	0,000	0,000	1,000	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,090	1,149	0,257	
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,745	8,699	0,000	
Moderasi SAKD*PABK	0,205	2,690	0,010	Diterima

Sumber: Output XLSTAT PLS PM 2014.



Gambar 3. Full Model Moderasi SIPKD*PABK

Dengan menggunakan pendekatan PLS, maka dapat dikelompokkan variabel moderator, yaitu (Sugiono, 2004):

- 1). Bila persamaan (2) β_{2Z} , β_2 signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X^*Z$, β_3 tidak signifikan, maka variabel Z bukan variabel moderator, tapi ia merupakan suatu variabel independen, intervening, exogenous, antecedent, atau prediktor.
- 2). Bila persamaan (2) β_{2Z} , β_2 tidak signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X^*Z$, β_3 signifikan, maka Z merupakan Pure Moderator (Z merupakan variabel moderator murni)
- 3). Bila persamaan (2) β_{2Z} , β_2 tidak signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X^*Z$, β_3 tidak signifikan, maka variabel Z merupakan Homologizer Moderator.
- 4). Bila persamaan (2) β_{2Z} , β_2 signifikan dan persamaan (3) $\beta_3 X^*Z$, β_3 signifikan, maka variabel Z merupakan suatu Quasi Moderator.

Berdasarkan hasil analisis data dengan merujuk pada pada ketentuan diatas menurut (Tambun, 2013), maka jenis moderasi untuk hipotesis 4 adalah Quasi Moderator. Artinya bahwa konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan konstruk yang memoderasi hubungan antara konstruk sistem akuntansi keuangan daerah dengan konstruk kinerja pemerintah daerah, sekaligus konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja juga menjadi konstruk eksogen/independen.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini terjadi karena unsur indikator pembentuk konstruk yang terdiri dari Keamanan Data, Kecepatan dan Ketepatan Waktu Akses, Ketelitian, Variasi Output, dan Relevansi/Kesesuaian dapat memberikan pengaruh terhadap terhadap kinerja pemerintah daerah secara positif (0,078) dan signifikan pada 0,000 ($7,851 > 1,658$).

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lamitasari, 2021), dan (Yuliani, 2014), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh parsial antara sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah, serta memberikan informasi yang akurat dan benar dalam rangka memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan di setiap OPD serta output yang sangat penting terkait LAKIP yaitu laporan berkala dan laporan tahunan.

Keamanan data adalah aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Data yang tidak aman dapat mengakibatkan kerugian besar dan kerusakan reputasi pemerintah daerah. Keamanan data meliputi aspek seperti proteksi data dari akses tidak sah, penggunaan teknologi yang efektif untuk mengantisipasi kerusakan akibat virus komputer, serta penggunaan sistem autentikasi yang tepat untuk mengontrol akses ke data. Keamanan data yang baik dapat memastikan bahwa data keuangan daerah tetap aman dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Kecepatan dan ketepatan waktu akses adalah kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengakses data keuangan dengan cepat dan tepat waktu untuk mengambil keputusan yang tepat. Kecepatan dan ketepatan waktu akses memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan keuangan yang cepat, serta memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.

Ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan. Ketelitian meliputi aspek seperti akurasi data, ketepatan waktu, dan integritas data. Ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan keuangan yang cepat, serta memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.

Variasi output dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan keuangan yang cepat. Variasi output meliputi aspek seperti variasi dalam pengelolaan keuangan, variasi dalam penggunaan teknologi, dan variasi dalam pengembangan sistem informasi. Variasi output memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan keuangan yang cepat, serta memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.

Relevansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah relevan dan akurat. Relevansi meliputi aspek seperti relevansi data keuangan dengan tujuan pemerintah daerah, relevansi data keuangan dengan kebutuhan pemerintah daerah, dan relevansi data keuangan dengan kinerja pemerintah daerah. Relevansi dalam pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menanggapi perubahan keuangan yang cepat, serta memastikan bahwa data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah akurat dan relevan.

SIPKD memiliki beberapa fungsi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pertama, sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan daerah. Informasi keuangan yang disajikan secara transparan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memahami penggunaan dana yang dialokasikan untuk kepentingan daerah. Kedua, SIPKD memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan daerah, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, sistem ini membantu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan cara yang lebih baik, seperti dengan mengoptimalkan penggunaan dana dan mengurangi biaya operasional.

Dalam konteks implementasi, SIPKD dipergunakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain SIPKD, aplikasi ini akan membantu mereka dalam melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi ke SIPKD.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini terjadi karena unsur indikator pembentuk konstruk yang terdiri Diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan, Penjurnalan dan postingan yang dilakukan sesuai, Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar, Penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik, dan Pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah sesuai prosedur yang berlaku dapat memprediksi memprediksi kinerja pemerintah daerah dengan hasil positif (0,440) dan signifikan pada 0,005 ($2,957 > 1,658$).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lamitasari, 2021), (Maliki, 2013), dan (Bong, 2021), bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dan terdapat pengaruh parsial antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Sistem akuntansi keuangan yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Standar akuntansi pemerintahan ini memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.

Pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus relevan dengan fakta/keadaan keuangan yang ada. Pencatatan keuangan yang relevan memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang relevan dan akurat.

Penjurnalan dan postingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah. Penjurnalan dan postingan yang sesuai dengan nomor ini memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.

Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.

Penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.

Pelaporan atau buku laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus sesuai prosedur yang berlaku. Pelaporan atau buku laporan yang sesuai prosedur ini memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang akurat dan relevan.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengaruh dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah akan menjadi lemah jika dimoderasi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, tetapi efek ini dapat dikurangi jika pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran berbasis kinerja yang efektif. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang efektif dapat mengurangi dampak positif dari penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga pengaruhnya menjadi lemah.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi hubungan antara sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. SIPKD dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data keuangan yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi cara SIPKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan. Anggaran berbasis kinerja memfokuskan pada tujuan

yang lebih spesifik dan kinerja yang lebih jelas, sehingga SIPKD harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lebih spesifik dan detail.

Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas SIPKD dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. SIPKD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan efektivitas SIPKD dalam meningkatkan kinerja.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat menjadi moderator yang mempengaruhi seberapa besar pengaruh SIPKD. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi cara SIPKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah telah menjadi subjek penelitian yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa data keuangan yang dikumpulkan dan disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penerapan anggaran berbasis kinerja (PABK) dapat mempengaruhi cara SAKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat menjadi moderator yang mempengaruhi seberapa besar pengaruh SAKD. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi cara SAKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat menjadi moderator yang mempengaruhi seberapa besar pengaruh SAKD. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi cara SAKD digunakan dan bagaimana informasi keuangan digunakan untuk mengambil keputusan.

5. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah, rumusan hipotesis dan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap Keamanan Data, Kecepatan dan Ketepatan Waktu Akses, Ketelitian, Variasi Output, dan Relevansi/Kesesuaian.
- 2). Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang mensyaratkan adanya standar akuntansi pemerintahan, pencatatan keuangan yang dilakukan telah relevan, penjurnalan dan postingan yang dilakukan sesuai, penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar, penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik, dan pelaporan atau buku laporan yang dibuat telah sesuai prosedur yang berlaku.
- 3). Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan yang memoderasi hubungan antara sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah, sekaligus konstruk penerapan anggaran berbasis kinerja juga menjadi konstruk eksogen/independen.
- 4). Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan konstruk yang memoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah, sekaligus penerapan anggaran berbasis kinerja juga menjadi konstruk eksogen/independen.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R., & Hidayat, I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Nilai Tukar Terhadap Nilai Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 10(1).
- Bong, E. Y. M. (2021). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Manggarai Timur.*

- Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginanjari, D., Pasolo, F., Siahaya, A., & Saleh, K. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Polda Papua). *The Journal of Business and Management Research*, 2(2), 224–232.
- Khusaini, M., Ashar, K., & Maski, G. (2021). *Manajemen Belanja Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1).
- Kustina, K. T., Nurhayati, M., Pratiwi, E., Lesi Hertati, S. E., CAPM, A. C. A. C. T. A. A. C., Qodari, A., Ak, M., Asti Nurhayati, S., Asri Jaya, S. E., & Saefullah, A. (2022). *Sistem informasi manajemen*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Lamitasari, E. (2021). *PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENILAIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Malang)*. UNIVERSITAS ISLAM MALANG.
- Maliki, W. (2013). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kota Gorontalo)*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Martadisastra, D. S. (2017). *Kinerja Pemasok Dalam Rantai Pasokan Makanan Kemasan : Suatu Kajian Kasus Di Indonesia*. 12(1).
- Mulyadita, R. M. (2021). ANALISA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 34–42.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62.
- Prabowo, M. (2020). *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi*. LP2M Press IAIN Salatiga.
- Prehanto, D. R., Kom, S., & Kom, M. (2020). *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Putri, H. J., & Pinang, I. P. R. H. T. (n.d.). *SISTEM EKONOMI INDONESIA BELANJA PUBLIK*.
- Ritonga, J., & Nurlaila, N. (2023). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintahan Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 153–166.
- Sugiono. (2004). Konsep, Identifikasi, Alat Analisis dan Masalah Penggunaan Variabel Moderator. *Studi Manajemen & Organisasi*, 1(2), 61–70.
- Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syamjaya, S., & Saputra, H. (2021). AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH PADANG LAMBE KOTA PALOPO. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(2), 10–15.
- Tambun, S. (2013). Teknik Pengolahan Data dan Interpretasi Hasil Penelitian Dengan Menggunakan Program SPSS Untuk Variabel Moderating. *Workshop Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Yuliani, N. L. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 128–157.